

ANALISIS PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KECAMATAN SINDANGRESMI PANDEGLANG BANTEN

Ita Rosita Wahyiah¹, Luis Fiska Rahayu²

Universitas Bina Bangsa

Email Korespondensi: ita.rosita.wahyiah@binabangsa.ac.id

Email: luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

ABSTRACT

The implementation of governance, especially in the context of regional government, in this case the Sindangresmi District, faces many obstacles, one of which is in terms of services that do not prioritize the community, besides that, human resources who are of less quality are not friendly or impolite in providing services. The purpose of this study is to find out how far the implementation of good governance is carried out in Sindangresmi District, Pandeglang Regency, Banten. The method used is descriptive qualitative. The results of this study show that the implementation of good governance in Sindangresmi District, Pandeglang-Banten Regency is not fully implemented properly. and society. The results of the study stated that good governance was hampered because the facilities and infrastructure, both technology tools and human resources, were still lacking in quality, management in public services, the weak quality and capacity of government apparatus human resources in the Sindangresmi District and the lack of formation of civil servants in the Sindangresmi District

Keywords: Governance, Good Governance, Analysis

ABSTRAK

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan khususnya dalam konteks pemerintahan daerah dalam hal ini Kecamatan Sindangresmi banyak sekali kendala yang dihadapi salah satunya yaitu dalam hal pelayanan yang kurang memprioritaskan masyarakat, selain itu SDM yang kurang berkualitas tidak ramah atau kurang sopan dalam memberikan pelayanan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di laksanakan di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini karena kurangnya sinergitas Antara berbagai stake holder yaitu Bupati sebagai penanggung jawab, camat sebagai pelaksana dan pemimpin di daerah kecamatan, dan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa good governance terhambat karena sarana dan prasarana baik alat teknologi maupun SDM yang masih kurang berkualitas, manajemen dalam pelayanan publik, lemahnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah di Kecamatan Sindangresmi dan kurangnya formasi PNS di Kecamatan Sindangresmi.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Good Governance, Analisis.

PENDAHULUAN

Syarat agar terciptanya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2019:14) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, efisiensi serta akuntabilitas". Dalam upaya mewujudkan paradigma *Good Governance* yang merupakan bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tentu

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai *stakeholders* untuk mewujudkannya.

Peranan pimpinan ditingkat kecamatan sangat diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good governance*. Namun hal ini mengalami banyak kendala seperti sikap acuh dan cuek kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, rendahnya SDM aparat pemerintahan kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten, tarif pelayanan yang tidak jelas, waktu pelayanan lambat tidak efektif dan efisien.

Pemberian pelayanan publik di Kecamatan Sindangresmi bisa dikatakan belum efektif. Masih lemahnya manajemen SDM, lemahnya kemampuan SDM baik para staf maupun ASN dilingkungan kecamatan yang memang masih kurang. Berpatokan dari hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan kedalam bentuk jurnal ilmiah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti menemukan bahwa tata kelola pemerintahan Kecamatan Sindangresmi tidak optimal, serta tidak didukung dengan sarana prasarana yang menunjang seperti kurangnya SDM yang berkualitas, kurangnya pemahaman aparatur kecamatan mengenai *Good Governance*, manajemen pelayanan yang belum efektif dan efisien sehingga pelayanan masih dirasa berbelit-belit, tidak adanya keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan peran dari aparatur pemerintah sebagai contoh pemerintah yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan sindangresmi kabupaten pandeglang harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik. Agar prinsip *good governance* dapat terimplementasikan dengan baik. Artinya dalam hal ini harus ada hubungan yang baik antar element seperti pemerintah kabupaten, kecamatan dan masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 226 dijelaskan bahwa : “Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa /kelurahan merupakan salah satu tugas dari pemerintah kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selain dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, ada juga hal yang perlu diperhatikan antara pengawas pelaksana administrasi kecamatan dan penyelenggaraan administrasi kecamatan. Agar penyelenggaraan administrasi bisa diterapkan secara komprehensif”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang akan dituangkan kedalam jurnal ilmiah. Untuk lebih memperjelas maka peneliti mengidentifikasi fokus dari penelitian ini dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Adapun Fokus dari penelitian ini yaitu : Bagaimana Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kecamatan Sindangresmi.

Tujuan penelitian ialah menggambarkan maksud penelitian yang akan dilakukan. Tujuan studi mesti berhubungan dengan fokus masalah atau fokus penelitian yang sudah dirumuskan oleh penulis terlebih dahulu. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2013:53-54) adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa atau pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan *Good Governance* di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang-Banten.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *Good Governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kata *Good Governance* menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintah Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang di alami berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Adanya *Good Governance* merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan.

Banyaknya harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk menyelenggarakan *Good Governance* adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Adanya pandangan baru dalam pemerintahan pasca era reformasi menitik beratkan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI.

Dalam hal ini kinerja pemerintah mendapat penilaian langsung dari masyarakat. Khususnya pemerintah kecamatan yang posisinya lebih dekat dengan masyarakat. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kantor Camat mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Dalam Pasal 224 di jelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang di sebut Camat. Camat di angkat oleh Bupati/Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya.

Dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dalam Pasal 1 ayat (1) dimana Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan yang dimaksud Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Seperti tertuang dalam pasal 11 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, pemerintah kecamatan (camat) dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah terutama yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Fungsi utama pemerintah kecamatan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas tugas pembinaan wilayah. Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus dapat mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Untuk mengetahui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang sudah terlaksana dengan baik atau belum, maka dalam penelitian ini, peneliti

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

mengukur dengan menggunakan teori dari Sedarmayanti (2012:2), yaitu prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat dari :

1. Akuntabilitas
2. Transparan,
3. Responsif,
4. Partisipasi,
5. Efektivitas dan efisien,
6. Keadilan

Adapun hasil penelitian ini jika dilihat dari aspek-aspek tersebut, menurut peneliti Kecamatan Sindangresmi kurang dalam hal Transparan, efektif dan efisien. Dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, masih terlihat kurang transparan dalam hal administrasi yang di perlukan, tidak di tempel di papan informasi mengenai persyaratan, dana dan waktu dalam pembuatan dokumen contohnya dalam pembuatan KTP. Peneliti melihat prosedur masih berbelit-belit, waktu yang tidak jelas kapan selesai nya dan terkendala dalam pemberian pelayanan lain, staf kurang ramah dan acuh tak acuh. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada *good governance* tidak akan terrealisasikan. Mengingat bahwa *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan tata pemerintahan.

Pemerintah sudah membuat konsep prinsip prinsip *Good governance* untuk meningkatkan kemampuan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik atau tata pemerintah yang baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat yang menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi masih cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* belum dilaksanakan secara optimal masih sangat jauh dari harapan. Masih adanya permasalahan seperti bekerja di luar kewenangan, kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Oleh karena itu untuk mewujudkan *Good Governance* di kecamatan sindangresmi diperlukan peranan Camat.

Dalam hal ini Camat selaku pemimpin pemerintahan di kecamatan harus mampu berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan. Dengan peranan yang efektif dari Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut diharapkan *Good Governance* dapat terwujud.

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik *Good Governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2019:14) adalah meliputi *transparansi, responsive, efektif, efisiensi serta akuntabilitas*".

Selain itu menurut Sedarmayanti (2012:2) Menyatakan bahwa "*Good Governance* merupakan suatu Pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik. Terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis".

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma *Good Governance* yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai *stakeholders* untuk mewujudkannya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

Peranan Camat sebagai pimpinan ditingkat kecamatan, menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan *Good Governance*. Peneliti menemukan berbagai masalah, seperti sikap acuh dan cuek, kurangnya SDM, tarif pelayanan yang tidak jelas dan tidak terbuka, waktu pelayanan yang tidak efektif, dan proses pelayanan yang kurang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dari kenyataan yang dapat dilihat saat ini menurut peneliti bahwa sampai sekarang pelaksanaan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah dalam hal ini kecamatan di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan *Good Governance* secara utuh. Hal ini dirasakan pula oleh pemimpin pemerintah Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang yang peneliti temui di Kantor Kecamatan Sindangresmi yaitu Bapak Muklis Arifin selaku camat Sindangresmi menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Sindangresmi sendiri banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi salah satunya yaitu terhambatnya sarana dan prasarana baik alat teknologi maupun SDM yang masih kurang berkualitas”. Selain itu Muklis Arifin juga menyatakan pelaksanaan *Good Governance* di Kecamatan Sindangresmi belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena “masih adanya pejabat pemerintah yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, masih lemahnya manajemen dalam pelayanan publik, lemahnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah di Kecamatan Sindangresmi hal ini berdampak kepada kurangnya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat”.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh bapak sekmat kecamatan sindangresmi yaitu bapak Acep Jumhani beliau menyatakan bahwa “Kinerja pemerintah kecamatan memang belum maksimal dalam melaksanakan tata pemerintahan, khususnya dalam pelayanan kami masih terkendala dengan akses internet yang kadang susah sinyal, meski di kantor sudah ada wifi tapi tetap saja kadang ada saja gangguan. Selain itu staf memang masih banyak yang hanya lulusan SMA dan belum terlalu mahir dalam penggunaan teknologi khususnya computer dan internet”.

Pelaksanaan *good governance* terhambat karena pemerintahan Kecamatan Sindangresmi banyak mengalami kendala diantaranya yaitu sarana dan prasana kurang menunjang, kurang tersedianya alat-alat teknologi modern, seperti computer, internet dan perangkat penunjang lainnya sangat terbatas, selain itu mengalami hambatan susah sinyal karena jarak yang jauh dari pusat kota, sarana dan prasarana jalan akses masyarakat menuju kecamatan harus melalui jalan yang rusak dan licin. Hal ini yang menyebabkan staf kecamatan lambat dalam memberikan pelayanan, karena para staf mengeluhkan akses jalan, ke kabupaten yang cukup jauh selain itu jalan yang rusak juga mempengaruhi apalagi musim hujan.

Staf kecamatan sindangresmi bapak jaja beliau menyatakan bahwa “Kami memang mengeluhkan jalan dan jarak dari kecamatan ke kabupaten yang jauh juga merupakan hambatan kami dalam memberikan pelayanan, jadi sangat wajar menurut kami jika ada dana tambahan dalam memberikan pelayanan karena terkait transport dari kecamatan ke kabupaten yang jaraknya cukup jauh di tempuh dengan jarak kurang lebih 3 jam, selain itu akses jalan kerumah penduduk terhambat karena jalan rusak dan licin diperparah lagi kalau musim hujan, akses jalan sangat susah dan hal ini menjadi kendala kami dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu atau hemat waktu dan hemat dana”.

Pak Jaja juga menambahkan bahwa “Efektif dan efisien nya aparatur kecamatan sindangresmi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tergantung dari sarana dan prasarana yang mendukung”. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Sindangresmi juga menyampaikan hal tersebut, pelayanan berbelit-belit dan lambat, waktu yang tidak dapat dipastikan. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada kurangnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu hasil wawancara dengan sekmat Kecamatan Sindangresmi menyatakan bahwa, SDM aparatur kecamatan rendah karena tingkat pendidikan yang rendah, bapak camat selalu menyampaikan kepada staf untuk melanjutkan study ke pendidikan tinggi, namun masih ada beberapa staf yang belum memiliki ijazah S1. Hal ini memang di benarkan oleh camat sendiri bahwa pelayanan masih belum optimal karena SDM yang rendah serta kendala kendala lainnya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada instansi pemerintahan khususnya di kecamatan, pemerintah sudah menyusun strategi dalam pelayanan kepada masyarakat, salah satunya telah diatasi dengan cara memperpendek mekanisme dan prosedur pelayanan di beberapa jajaran birokrasi. Dalam hal pembuatan KTP saat ini perekaman data dalam pembuatan KTP bisa dilakukan di Kantor Kecamatan tidak perlu ke Kabupaten, sehingga hal ini dapat memperpendek mekanisme dalam pembuatan KTP.

Menurut peneliti terciptanya pemerintahan yang baik juga dipengaruhi oleh peran dari pemimpin itu sendiri, dalam hal ini camat sebagai pemimpin ditingkat kecamatan harus mampu menjalankan perannya dengan maksimal. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam pemberian pelayanan, sehingga diikuti oleh staf pemerintahan kecamatan lainnya. Pemimpin juga harus memberikan contoh bahwa masyarakat harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah dalam segi pemberian pelayanan dan pemenuhan-pemenuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kecamatan. Seorang pemimpin harus lebih dekat lagi dengan masyarakatnya, melakukan kunjungan-kunjungan secara langsung terjun kepada masyarakat agar mengetahui, melihat dan merasakan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Jika semua dapat dilaksanakan dengan baik tentu prinsip-prinsip *good governance* dapat terlaksana dengan maksimal. Menurut peneliti bahwa tata kelola pemerintahan atau *Good Governance* yang menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilakukan langsung oleh seluruh staf atau aparatur pemerintah di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang-Banten. dapat dinyatakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. *good governance* terhambat karena sarana dan prasarana baik alat teknologi maupun SDM yang masih kurang berkualitas, manajemen dalam pelayanan publik, lemahnya kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintah di Kecamatan Sindangresmi dan kurangnya formasi PNS di kecamatan Sindangresmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sadat Jurnal public/undhar/medan/ vol 11 No 1 Tahun 2017. Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Diakses pada 20 Desember 2022
- Arikunto Suharismi, 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : PT. Rineka Cipta.,
- Andrianto, N. 2017. Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim : Malang.
- Berry, L.L., Zeithaml, V.A. and Parasuraman, A. (2019), "*Quality counts in services too*", Business Horizons.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Deska Zulkarnain dan Mitrayanti Peranan Camat Dalam Mewujudkan Tata pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Buru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
- Desmayani Jurnal fisipol Universitas Jambi 2015. Peranan Camat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Kantor Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun" Diakses pada 20 Desember 2022
- Hasibuan, Malayu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
<http://ejournal.unwmataram.ac.id/sikap/article/view/138> (di unduh tanggal 12 Desember 2022 Jam 10.35 WIB).
- <https://indramayukab.go.id/upaya-wujudkan-good-government-camat-arahan-lakukan-pembinaan-ke-desa-desa/> (di unduh tanggal 12 Desember 2022 Jam 10.35 WIB).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 8 Nomor 3 Maret 2022

- [http://Journal.uir.co.id/JIAP/jurnal ilmu Administrasi Publik Vol 6 No 1 tahun terbit /2020](http://Journal.uir.co.id/JIAP/jurnal%20ilmu%20Administrasi%20Publik%20Vol%206%20No%201%20tahun%20terbit%20/2020). diakses pada 20 Desember 2022
- <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/308> (Jurnal di unduh tanggal 12 Desember 2022 Jam 10.35 WIB).
- <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1167> (Di unduh tanggal 12 Desember 2022 Jam 10.35 WIB).
- <https://media.neliti.com/media/publications/1409-ID-peranan-camat-dalam-mewujudkan-good-governance-di-kecamatan-tombatu-kabupaten-mi.pdf>. (Jurnal di unduh tanggal 12 Desember 2022, jam 10.30 WIB)
- Moleong Lexy J, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2018. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pandji Santoso, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Jakarta; Revika Aditama.
- Stanton, William J. 2012. Prinsip pemasaran, alih bahasa : Yohanes Lamarto Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, 2012. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- , 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto. Et. Al. 2013, Teknik Sampling, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2016. Repormasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasinya. Jakarta: Bumi Aksara Sinambela,
- , 2018. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2012, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.
- , 2012, Good Governance : Membangun Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Mandar Maju, Bandung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id